

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem demokrasi dan mempunyai sumber daya alam yang luas. Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, perlu ditingkatkan terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus.

Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan yang memasung hak-hak asasi manusia, hak-hak warganegara untuk dapat menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Kehidupan yang demokratis didalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi non pemerintah perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi serta demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan dan keadilan.

Berkenaan dengan hal tersebut, sekolah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik yakni : (1) warga negara yang patuh terhadap peraturan , (2) warga negara yang sadar

hak dan kewajibannya, (3) warga negara yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah adalah menyelenggarakan program pendidikan yang memberikan berbagai kemampuan sebagai seorang warga negara melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKn.

Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional dinyatakan bahwa “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa” (ayat 1, pasal 4), selanjutnya ayat (1) pasal 5 menyatakan: “setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Dinn wahyudin:2011:1.34).

Sementara itu UU Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.

Dengan dasar atau landasan proklamasi bangsa Indonesia bertekad mengupayakan pencapaian cita-cita nasional, dan tujuan nasional sebagai bagiannya yang telah di sepakati bersama, tercantum dalam Pembukaan Undang-Undsng Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun sebagai landasan pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan latihan bagi peranannya di masa mendatang.

Adapun mata pelajaran yang dimaksud yaitu Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, suku bangsa, dan memahami serta mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara yang baik, yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Namun dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam meningkatkan kualitas pendidikan tidak terlepas dari peran seorang guru, karena guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang penting dan memiliki tanggung jawab dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Terlebih lagi dalam era yang semakin kompetitif dan banyaknya perubahan yang sering terjadi dalam pendidikan. Sebenarnya guru dituntut memiliki kompetensi yang lebih baik dalam upaya menghasilkan lulusan yang baik dan meningkatkan kualitas pendidikan disekolahnya. Dan pendidikan juga adalah suatu proses pertumbuhan didalam, dimana individu diberi pertolongan untuk mengembangkan kekuatan, bakat kemampuan dan minatnya.

Akan tetapi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan masih banyak di temukan siswa yang kurang termotivasi dalam proses belajar mengajar terutama dalam pelajaran PPKn, mereka menganggap bahwa pelajaran ppkn belum termasuk di ujian nasional maka dari itu mereka menganggap remeh terkait pelajaran tersebut.

Menurut Robert B. Howsam et al. (dalam Soetjipto dan Rafli Kosasi:2012:25-26), bahwa guru harus dilihat sebagai profesi yang baru muncul,

dan karena itu mempunyai status yang lebih tinggi dari jabatan semiprofessional, malahan mendekati status jabatan profesi penuh. Pada saat sekarang, seperti telah dijelaskan juga di depan, sebagian orang cenderung menyatakan guru sebagai profesi, dan sebagian lagi tidak mengakuinya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan jabatan guru sebagian, tapi bukan seluruhnya, adalah jabatan professional namun sedang bergerak ke arah itu. Selain itu guru di beri penghargaan oleh pemerintah melalui Keputusan Menpan No. 26 Tahun 1989, dengan memberikan tunjangan fungsional sebagai pengajar, dan dengan kemungkinan kenaikan pangkat yang terbuka.

Berdasarkan pengalaman saya pada observasi awal di sekolah SMP Negeri 2 Limboto Kabupaten Gorontalo selama ini, siswa masih kurang dalam peningkatan hasil belajar siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar, terutama dalam pelajaran PPKn. Kemampuan siswa dalam menguasai materi dan cara guru menyampaikan pelajaran sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Maka dari itu ketuntasan belajar siswa tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam kriteria ketuntasan minimalnya (KKM).. Menurut penelitian yang saya lakukan rata – rata siswa belum bisa mencapai KKM yang telah ditentukan.

Berikut nilai mata pelajaran PPKn kelas IX⁶ SMP 2 Limboto yang masih belum optimal yakni belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 75, dengan jumlah siswa 29 orang, laki-laki 16 orang dan perempuan 13 orang, yang tidak mencapai kkm 5 orang atau 17,24%, sedangkan yang mencapai kkm 24 orang atau 82,75%.

Untuk itu penerapan model pembelajaran *Time Token* dan *Problem Posing* dirasa dapat membantu pendidik maupun siswa dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn khususnya bagi siswa Kelas IX⁶ SMP Negeri 2 Limboto Kabupaten Gorontalo.

Berangkat dari semua itu, kajian dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang bagaimana penerapan model *Time Token* dan *Problem Posing* dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn khususnya bagi siswa Kelas IX⁶ SMP Negeri 2 Limboto Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan penjelasan di atas, calon peneliti mengajukan judul penelitian sebagaimana berikut ini: **“Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran *Time Token* Dan *Problem Posing* Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Kelas IX⁶ SMP Negeri 2 Limboto Kabupaten Gorontalo”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah:

1. Hasil belajar siswa yang kurang maksimal dikelas IX⁶ SMPN 2 Limoto.
2. Guru jarang menggunakan model pembelajaran.
3. Siswa kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran.

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi peneliti dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka calon peneliti merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini adalah: “Apakah dengan menggunakan model pembelajaran Time Token dan Problem Posing akan meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn di Kelas IX⁶ SMP Negeri 2 Limboto Kabupaten Gorontalo?”

1.4 Pemecahan Masalah

Dengan menggunakan model pembelajaran *time token* dan *problem posing*, siswa akan lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, sehingga motivasi belajar yang diharapkan dapat tercapai dengan adanya ide-ide baru yang muncul pada dua model pembelajaran ini, selain itu siswa juga mampu menerima proses belajar mengajar dengan baik dengan adanya dua model pembelajaran tersebut yaitu model pembelajaran *Time token* dan *Problem posing*.

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian tindakan kelas (PTK) yaitu: untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PPKn melalui model pembelajaran *Time Token* dan *Problem Posing* pada siswa kelas IX⁶ SMP Negeri 2 Limboto Kabupaten Gorontalo.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kemanfaatan sebagai berikut:

1. Bagi peserta didik:
 - a) Dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya di mata pelajaran PPKn.
 - b) Melatih siswa dalam berbicara dan menganalisa masalah yang terjadi.
 - c) Memberikan wawasan tentang ilmu sosial khususnya di bidang pendidikan.
2. Bagi guru:
 - a) Dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan model pembelajaran yang lebih inovatif guna meningkatkan mutu pembelajaran.
 - b) Menumbuhkan rasa percaya diri.
 - c) Membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi.
3. Bagi sekolah
Menjadi salah satu rangkaian pemikiran dalam meningkatkan profesionalisme guru PPKn khususnya dalam penerapan gabungan model pembelajaran Time Token dan Problem Posing.
4. Bagi Peneliti
Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti terutama bagaimana cara meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan dua model pembelajaran Time Token dan Problem Posing.

